



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAN WIDHIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN II
3. NHK : 878268

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.625.000.000**

1. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/900 m2 di KAB / KOTA
KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **397.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU AYLA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO S Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **405.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	323.797.207
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.140.735.486
Sub Total	Rp.	3.891.532.693
III. HUTANG	Rp.	148.575.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.742.957.693

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.